



Pengambilan Paksa Jenazah Positif COVID-19 di Indonesia: Bukan Fenomena Biasa?

Oleh

Muhammad Sinatra¹

Former Analyst at the Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia
muhammadsinatra@yahoo.com

Pendahuluan

Sejak tahun 2020, insiden pengambilan paksa jenazah positif COVID-19 telah mengejutkan masyarakat Indonesia dan menghadirkan nuansa yang cukup aneh dalam perjuangan melawan pandemi di dalam negeri. Dalam insiden-insiden tersebut, keluarga maupun kenalan korban mengambil paksa jenazah korban COVID-19 dan para pelaku terpaksa harus berurusan dengan penegak hukum atas perbuatannya.

Pelaku umumnya mendatangi rumah sakit, menghentikan ambulans, ataupun membongkar kuburan dengan tujuan menyelenggarakan ritual pembersihan dan penguburan jenazah sesuai dengan keyakinannya, meskipun hal ini tidak sejalan dengan protokol kesehatan di masa pandemi. Media seringkali melabeli insiden-insiden ini sebagai kasus "pencurian jenazah" meskipun para pelaku tidak menganggap tindakan mereka sebagai aksi "pencurian".

Tidak semua usaha pengambilan paksa tersebut berhasil. Namun, fakta bahwa para pelaku berani melakukan upaya pengambilan paksa ini menunjukkan sejauh mana mereka dapat bertindak berdasarkan keyakinan mereka. Motif yang memungkinkan dari para pelaku diantaranya dorongan rasa kedukaan ataupun keinginan memberikan ritual penguburan yang sesuai dengan tradisi. Selain itu, penyangkalan terhadap COVID-19 dan ketidakpercayaan terhadap pihak berkuasa juga dapat memiliki andil dalam fenomena ini.

Insiden-insiden tersebut telah mengejutkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan akar rumput dan elit politik. Dengan menyinggung fenomena ini dalam pidatonya pada 16 Agustus 2021,



Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)² membuktikan pentingnya isu pengambilan paksa jenazah dalam dinamika COVID-19 di Indonesia. Terdapat beberapa alasan yang dapat menjelaskan hal tersebut.

Pertama, frekuensi terjadinya insiden tersebut. Insiden-insiden ini bukanlah kejadian khusus yang hanya terjadi di awal pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini, setidaknya ada 13 insiden yang tercatat sejak bulan Juni 2020 – dimana kejadian terakhir tercatat bersamaan dengan waktu ditulisnya tulisan ini (September 2021).³ Ada juga kemungkinan beberapa insiden yang tidak diliput dan diberitakan secara massal. Kedua, karakter ganjil dari insiden tersebut. Pengambilan paksa jenazah adalah suatu tindakan sangat tidak lazim yang mengingatkan masyarakat akan kasus-kasus kriminal “pencurian jenazah” di masa lalu. Pandangan negatif terhadap insiden-insiden ini bisa disebabkan oleh dampak hukum dan kesehatan, terutama karena potensinya dalam menyebarkan virus COVID-19. Ketiga, maraknya insiden ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Terdapat banyak kasus pengambilan paksa jenazah di Sulawesi Selatan, namun ada juga kejadian di Sumatra, Nusa Tenggara, dan Jawa.

Alasan-alasan inilah yang membuat fenomena pengambilan paksa jenazah ini dipandang signifikan di Indonesia dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia⁴ atau Kamerun.⁵ Seringnya terjadi insiden yang tidak lazim ini mengindikasikan adanya suatu hal yang sedang berlangsung di masyarakat Indonesia, yang patut untuk diselidiki lebih lanjut. Menariknya, insiden-insiden yang tercatat mempunyai beberapa kesamaan walaupun masing-masing memiliki karakter unik yang membedakan satu sama lain. Beberapa tren di bawah ini menunjukkan berbagai keunikan tersebut.

Beberapa insiden terjadi karena kegagalan komunikasi antara petugas medis dan keluarga jenazah. Sebuah kerumunan di Bekasi⁶ mengambil paksa jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) pada Juni 2020 karena khawatir penguburan protokol COVID-19 tidak sesuai dengan ajaran agama mereka. Setelah jenazah yang diambil paksa dikuburkan, mereka meminta maaf kepada otoritas karena jenazah terbukti negatif COVID-19.

Komunikasi dalam keadaan sulit dan penuh tekanan bisa lebih terhambat oleh hasutan pelaku yang tidak bertanggung jawab. Sebuah keluarga besar di Makassar⁷ terprovokasi untuk mengambil paksa jenazah kerabat mereka meskipun awalnya sudah menerima penanganan petugas atas masalah tersebut. Keterlibatan senjata tajam dan kekerasan juga menjadi masalah. Insiden di Lombok,⁸ Makassar,⁹ dan Pamekasan¹⁰ merupakan aksi bentrokan antara kelompok yang-terkadang-bersenjata dengan Satuan Petugas (Satgas) COVID-19, polisi, dan juga tentara militer yang mengindikasikan





sentimen anti kekuasaan. Bentrokan ini tidak hanya mengabaikan protokol kesehatan yang berlaku, namun juga menambah lebih banyak tekanan kepada pasukan garis depan.

Kekuasaan politik juga memiliki andil. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinyatakan sebagai tersangka dalam sebuah insiden dimana ia memaksa manajemen sebuah rumah sakit untuk melepaskan seorang pasien yang sudah meninggal.¹¹ Kasus ini membuktikan bahwa pengambilan paksa jenazah bukanlah fenomena eksklusif yang terjadi di kelompok akar rumput saja – tingkah anggota dewan ini berpotensi membenarkan perilaku ganjil ini di kalangan masyarakat dan memicu terjadinya insiden-insiden lain.

Berbagai insiden ini juga dapat dikaitkan dengan hal-hal metafisika. 6 orang di Parepare ditangkap setelah membongkar tujuh kuburan dan memindahkan jasad pasien COVID-19 ke tempat yang lain.¹² Saat diinterogasi polisi, mereka mengaku bahwa para almarhum meminta jenazahnya dipindahkan melalui percakapan dalam mimpi.

Analisis

Para pelaku pengambilan paksa jenazah nampaknya tidak terpengaruh oleh peraturan hukum yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang mengancam pidana penjara setidaknya selama 5 tahun. Pelaku juga terlihat secara terbuka menentang protokol kesehatan yang diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹³ Apa saja yang mungkin menjelaskan penolakan mereka terhadap kewenangan hukum dan agama di Indonesia?

Perspektif psikologis dan budaya dapat menjelaskan beberapa hal.

Penanganan Satgas terhadap jenazah yang dinyatakan positif COVID-19 memerlukan isolasi ketat untuk menghindari penyebaran penyakit. Hal ini berarti bahwa seluruh prosesi pemulasaran jenazah (pemandian, pengafanan, dan penyolatan bagi jenazah Muslim) dilaksanakan tanpa kehadiran anggota keluarga. Mereka hanya mampu melihat jenazah pada saat penguburan di mana mereka tetap harus menjaga jarak dari satu sama lain.

Protokol kesehatan yang berlaku pada dasarnya menghilangkan kesempatan bagi anggota keluarga untuk menghabiskan masa-masa terakhir mereka dengan korban COVID-19 dan memberikan





penghormatan terakhir dalam bentuk prosesi penguburan secara tradisional. Secara pragmatis, masa duka pada periode ini penting untuk para keluarga dan kenalan korban karena mereka perlu masa untuk memproses kehilangan, mengungkapkan kesedihan, dan memahami emosi yang mereka rasakan. Mereka juga perlu untuk menghubungkan penyebab kematian ke subjek tertentu (dalam hal ini COVID-19) yang merupakan proses penting untuk melanjutkan hidup mereka.

Rasa bersalah juga dapat dihubungkan dengan urgensi untuk menghormati orang yang telah wafat. Anggota keluarga hanya bisa melihat jenazah saat penguburan setelah melewati masa-masa terakhir korban karena pembatasan sosial yang berlaku. Sejatinya, pelaksanaan prosesi penguburan secara tradisional dapat berfungsi sebagai sarana bagi keluarga dan kerabat untuk memberikan penghormatan terakhir dan menebus rasa bersalah mereka karena tidak dapat hadir di sisi korban COVID-19 di saat-saat terakhir. Insentif yang kuat dan sangat manusiawi ini dapat dengan mudahnya mendorong orang yang berduka untuk melakukan hal yang cukup ekstrem, seperti mengambil paksa jenazah dari fasilitas kesehatan.

Prosesi penguburan secara tradisional atau agama juga merupakan bagian penting dari pelestarian warisan budaya.¹⁴ Kegiatan-kegiatan seperti memandikan jenazah, khotbah oleh pemuka agama, pengiriman sembako, dan donasi pada keluarga yang ditinggalkan dapat mempererat rasa persatuan dalam suatu komunitas. Prosesi penguburan juga merupakan sebuah ruang untuk secara formal menyatakan kematian seseorang dan menegaskan kembali hubungan korban dengan pelayat, sehingga dapat melestarikan identitas sosial korban bahkan setelah kematiannya.¹⁵

Lebih jauh lagi, penguburan secara protokol kesehatan meniadakan ruang pribadi bagi pelayat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas dan memproses dampak psikologis dari kematian seseorang yang disebabkan oleh virus Corona. Hal ini juga menghalangi korban meninggal untuk mendapatkan pelayanan yang dapat menegaskan fungsi sosial dan keberadaan mereka di tengah masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa hal-hal ini dapat memicu rasa cemas bagi keluarga yang ditinggalkan sebab dibebankan pikiran bahwa jenazah tidak diproses dengan cara yang benar dan manusiawi sesuai tradisi.

Terlepas dari karakter sosial-budaya yang tampak dari fenomena pengambilan paksa jenazah ini, ada beberapa aspek sosio-politik nyata yang perlu dipertimbangkan.





Insiden-insiden ini menggarisbawahi betapa sulitnya mendamaikan “seteru” antara sains dan tradisi di kalangan rakyat Indonesia. Kebanyakan rakyat Indonesia merupakan komunitas yang sangat spiritual dan mempercayai hal-hal berbau metafisik, terlepas dari ketertarikan yang mereka tunjukkan terhadap pembangunan dan modernitas. Kepercayaan mereka terhadap tradisi dan hal-hal metafisik sering mengguguli hal-hal berbasis sains yang ada untuk melindungi hidup mereka.

Insiden pembongkaran kuburan yang disebut di atas hanyalah salah satu contoh. Contoh lain termasuk mengunjungi rumah ibadah atau melakukan pertemuan keagamaan dengan mengabaikan protokol kesehatan. Hal-hal seperti ini seringkali menimbulkan pertanyaan jika beberapa segmen di masyarakat yang masih memahami agama dari pendekatan unidimensi dan kesulitan untuk menerapkan prinsip agama yang sejati di dalam kehidupan mereka.

Terkait dengan itu adalah ketidakpercayaan pada pihak berwenang. Fenomena pelanggaran protokol kesehatan pada dasarnya adalah salah satu bentuk penolakan, khususnya terhadap rezim Satgas COVID-19 yang berbasis sains dan otoritas pemerintah pada umumnya. Penolakan ini dapat dipicu oleh persepsi konservatif tentang ketidak-efisienan dan efektivitas pemerintah, terutama dalam penyediaan barang dan jasa.

Kasus korupsi yang merajalela dan sentimen rendah terhadap birokrasi Indonesia yang rumit dapat menambah rasa ketidakpercayaan yang bermanifestasi dalam berbagai macam kegiatan anti pemerintah. Fenomena pengambilan paksa jenazah adalah salah satu contohnya, walaupun pada akhirnya para pelakulah yang harus membayar konsekuensinya, baik dalam bentuk hukuman ataupun konsekuensi kesehatan.

Sentimen anti pemerintah ini juga mengindikasikan kesenjangan yang melebar antara pemegang kekuasaan dan masyarakat, dimana juga dapat menjelaskan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan selama pandemi. Krisis nasional memang sulit untuk dikelola tanpa adanya partisipasi yang baik dari masyarakat dalam melaksanakan langkah penanggulangan. Dengan empat juta kasus positif yang tercatat dan 140.000 kematian (pada saat penulisan-September 2021), perjuangan Indonesia melawan pandemi tidak bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, kesenjangan antara pemerintah dan rakyat merupakan sebuah rintangan yang tidak hanya menyulitkan penanggulangan pandemi di Indonesia, namun juga menghambat pembangunan negara.





Pada akhirnya, insiden pengambilan paksa jenazah adalah sebuah bentuk respons terhadap tragedi pandemi COVID-19 yang melambangkan pemberdayaan rakyat di komunitas akar rumput dan sentimen antipemerintah. Namun, dengan jumlah kematian yang sangat tinggi, waktu akan menjawab jika kedukaan rakyat yang ditinggalkan akan muncul sebagai *political currency* di pesta demokrasi yang akan datang.

Rasa duka adalah substansi yang kuat khususnya bagi mereka yang perlu memproses kematian orang lain selama masa pandemi ini yang bisa dicegah jika protokol kesehatan dapat dipatuhi dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Aktor oportunistik dapat juga mengeksploitasi emosi rakyat untuk menyalahkan berbagai macam pihak demi membangun popularitas politik.

Meskipun hal-hal di atas berpotensi menjadi pertanyaan riset suatu saat nanti, ada satu pertanyaan yang lebih genting untuk diangkat: apakah kita sudah memahami secara menyeluruh bagaimana rakyat Indonesia menanggapi kematian keluarga dan kenalan mereka yang disebabkan oleh COVID-19?

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, tiga rekomendasi patut untuk dilayangkan. Pertama, saran dari Presiden Joko Widodo sudah tepat untuk melibatkan para sosiolog dan antropolog dalam mendalami dampak mendalam pandemi COVID-19 terhadap masyarakat Indonesia.¹⁶ Kedua, pergeseran paradigma dibutuhkan dalam menyikapi dampak pandemi yang saat ini mengarah kepada dampak kesehatan dan ekonomi saja. Seperti yang artikel ini gambarkan, pandemi juga menciptakan pergolakan di ranah sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Ketiga, perlu adanya lebih banyak usaha untuk merekonsiliasi antara adat/tradisi masyarakat dan tuntutan berbasis sains agar strategi penanggulangan krisis berskala nasional dapat diimplementasikan dengan lebih menyeluruh.



Endnotes

- 1 Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada dua individu yang telah berkontribusi terhadap penyelesaian artikel ini. Dr Nadhilla Nurayu Latifa adalah seorang dokter yang memberikan konteks dan bukti nyata dari lapangan selama pandemi COVID-19. Pembingkai artikel ini juga telah diperbaiki berkat intervensi dari Dr Danial Yusof, seorang dosen dari International Islamic University of Malaysia (IIUM).
- 2 BeritaSatu. (2021, August 16). "Bambang Soesatyo: Tidak Ada Lagi Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19." BeritaSatu YouTube Channel. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=ui9cbDvUNnA>.
- 3 Budin, F. (2021, 18 September). "Luwu Timur Heboh Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19, 6 Pemuda Ditetapkan Tersangka." iNewsSulsel.id. Diakses dari <https://sulsel.inews.id/berita/luwu-timur-heboh-pengambilan-paksa-jenazah-covid-19-6-pemuda-ditetapkan-tersangka>.
- 4 Chong, R. (2021, 22 Januari). "4 siblings held for 'stealing' PUI father's body from Lahad Datu Hospital." The Vibes. Diakses dari <https://www.thevibes.com/articles/news/14814/4-siblings-detained-for-taking-pui-fathers-body-home>.
- 5 Ngade, I. (2021, 14 Januari). "What a "Safe and Dignified" Burial Means During a Pandemic." Sapiens. Diakses dari <https://www.sapiens.org/culture/body-snatching-covid-19/>.
- 6 Amindoni, A. (2020, 11 Juni). "Pengambilan paksa jenazah PDP Covid-19: 'Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya sanksi sosial yang kami dapatkan.'" BBC News Indonesia. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53009450>.
- 7 *Ibid.*
- 8 Shofa, J. N. (2020, 8 Juli). "Corpse Snatching of Covid-19 Patients Still Haunt Indonesia." Jakarta Globe. Diakses dari <https://jakartaglobe.id/news/corpse-snatching-of-covid19-patients-still-haunt-indonesia>.
- 9 The Jakarta Post. (2020, 10 Juni). "Families snatch dead bodies of COVID-19 patients from hospitals for burial." Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/09/families-snatch-dead-bodies-of-covid-19-patients-from-hospitals-for-burial.html>.
- 10 Tribun News. (2020, 17 Juni). "300 Warga Bersenjata Tajam di Pamekasan Ambil Paksa Jenazah Covid-19, Baju Hazmat Petugas Dilucuti." Diakses dari <https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/17/300-warga-bersenjata-tajam-di-pamekasan-ambil-paksa-jenazah-covid-19-baju-hazmat-petugas-dilucuti>.
- 11 Himawan. (2020, 2 Agustus). "Anggota DPRD yang Jamin Pengambilan Jenazah Covid-19 Tidak Ditahan." Kompas. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/07/19/11415371/anggota-dprd-yang-jamin-pengambilan-jenazah-covid-19-tidak-ditahan>.
- 12 Fauzan. (2021, 15 Maret). "Pengakuan Tersangka Pencuri Jenazah-Jenazah Pasien Covid-19 di Parepare, Kompak Dapat Wangsit." Liputan 6. Diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4506477/pengakuan-tersangka-pencuri-jenazah-jenazah-pasien-covid-19-di-parepare-kompak-dapat-wangsit>.
- 13 Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2020, 10 April). "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020." Covid19.go.id. Diakses dari <https://covid19.go.id/p/protokol/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-18-tahun-2020>.
- 14 Ademiluka, S. O. (2009). "The Sociological Functions of Funeral Mourning: Illustrations from the Old Testament and Africa." *Old Testament Essays* 22 (1): 9-20.
- 15 Mallik, V. V. (2020, 12 Maret). "Do the Dead Matter? Identifying Mourning and Funerals." E-International Relations. Diakses dari <https://www.e-ir.info/pdf/82235>.
- 16 Shofa, J. N. (2020, 8 Juli). "Corpse Snatching of Covid-19 Patients Still Haunt Indonesia." Jakarta Globe. Diakses dari <https://jakartaglobe.id/news/corpse-snatching-of-covid19-patients-still-haunt-indonesia>.



THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by contributors at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The Habibie Center was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center
Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560
Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212
Email: thc@habibiecenter.or.id
Website: www.habibiecenter.or.id